

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN DALAM
MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

SULISTRANI
NPM : 177310150

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bedar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selaam masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dijalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga selesai.
7. Terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anaknya agar menjadi lebih baik.
8. Terima kasih kepada kak Dila selaku orang yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada teman saya Azlinda, Barokatulaili, Erli, Nurul, Susi, Sintiya.
10. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Penulis

Sulistriani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	12
2. Konsep Strategi	16
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	21
4. Konsep Pendidikan	25
5. Konsep Anak Putus Sekolah	30
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	41

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan dan Key Informan.....	43
D. Teknik Penentuan Informan	44
E. Jenis Dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
H. Jadwal Waktu Kegiatan	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	48
B. Profil Singkat Kecamatan Gaung	51
1. Geografis dan Batas Wilayah	51
2. Keadaan Penduduk	52
3. Keadaan Sosial	53
C. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	54
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	56
E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	57
BAB V HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Identitas Informan	79
1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	79
2. Identitas Informan Berdasarkan Umur	80
B. Pembahasan dan Hasil	81
1. Pengamatan Lingkungan	83
2. Perumusan Strategi	87
3. Implementasi Strategi	91
4. Evaluasi dan Pengendalian.....	94

C. Faktor Penghambat Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	99
--	----

BAB VI PENUTUP **100**

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA **104**

LAMPIRAN..... **108**



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	38
--	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pendanaan Pendidikan	3
Tabel I.2	Data Anggaran Program Urusan Pendidikan	3
Tabel I.3	Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel I.4	Data Peserta Didik Kabupaten Indragiri Hilir	6
Tabel I.5	Data Anak Putus Sekolah	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel II.2	Operasional Variabel	41
Tabel III.1	<i>Informan Dan Key Informan</i>	44
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan	47
Tabel IV.1	Luas Wilayah	50
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Perkecamatan	53
Tabel V.1	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan	80
Tabel V.2	Identitas Informan Berdasarkan Umur	81

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sulistriani
NPM : 177310150
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaida-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2021
Pelaku Pernyataan,

Sulistriani

STRATEGI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh:
Sulistriani

Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menjadi suatu permasalahan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan terkait pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintahan pada Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun indikator penelitian ini yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu melibatkan orang-orang tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintahan pada Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan semestinya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal seperti ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pendidikan, lingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dari instansi setempat. Dalam kebijakan pemerintah daerah sendiri mengeluarkan kebijakan yaitu program wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemberian bantuan dana beasiswa bagi masyarakat miskin seperti program PIP (Program Indonesia Pintar), Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) namun dalam realisasinya bantuan ini masih belum tetap sasaran seperti penyalahgunaan dana beasiswa dari wali murid tersebut sehingga perlu adanya evaluasi dari pemerintah tersebut khususnya Dinas Pendidikan.

kata kunci : *Strategi, Dinas Pendidikan, Anak Putus Sekolah*

**GOVERNMENT STRATEGY AT THE EDUCATION OFFICE IN
OVERCOMING SCHOOL DROPOUTS IN GAUNG DISTRICT
INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

The low level of education in Gaung Subdistrict, Indragiri Hilir Regency is a problem of the lack of supervision from the Education Office regarding education. The purpose of this study was to determine the government strategy at the Education Office in overcoming school dropouts in Gaung District, Indragiri Hilir Regency. This study used qualitative research methods. The indicators of this research are environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. This research was conducted at the Indragiri Hilir Education Office. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation. The technique of determining informants is carried out using purposive sampling, namely the method of determining the informants deliberately based on certain criteria or considerations, namely involving certain people. Based on the results of the study, it can be concluded that the Government Strategy at the Education Office in Overcoming School Dropouts in Gaung District, Indragiri Hilir Regency has not been running properly, this is due to several factors, both internal and external factors such as economy, lack of public understanding of education, the surrounding environment, as well as lack of supervision from local agencies. In the regional government policy itself issued a policy, namely the 12 year compulsory education program as a form of providing scholarship funding for the poor such as the PIP program (Smart Indonesia Program), the BSM Program (Assistance for Poor Students) but in its realization, this assistance is still not targeted, such as misuse of funds scholarships from the student's guardians so that there needs to be an evaluation from the government, especially the Education Office.

keywords: Strategy, Education Office, School Dropout

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pendidikan menjadi perhatian lebih yang harus dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah yang bertanggung jawab atas pemerintahannya sendiri, maka dibentuklah azas-azas pemerintahan daerah yakni azas desentralisasi, azas desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yaitu di bidang pendidikan.(Triani dkk, 2019)

Berdasarkan uraian regulasi terkait pendidikan, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan pasal 11 ayat (2) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pendidikan. Merupakan tugas dari salah satu instansi pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat. (Benjamin dkk, 2017)

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranyayang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil. (Benjamin dkk, 2017)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Fauzi dkk, 2012)

Adapun anggaran pendanaan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pendanaan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019

No	Tahun	APBD	Urusan Non Pendidikan	Dana Daerah	Transfer Daerah
1	2017	Rp 2.185,2 M	Rp 1.673,3 M	Rp 225,5 M	Rp 286,5 M
2	2018	Rp 2.115,54 M	Rp 1.540,07 M	Rp 250,29 M	Rp 325,18 M
3	2019	Rp 2.251,94 M	Rp 1.652,0 M	Rp 308,7 M	Rp 291,3 M

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2017, 2018, 2019 anggaran yang dikeluarkan oleh APBD terus meningkat, adapun dana yang dikeluarkan APBD dan APBN untuk pendidikan hanya 20%. Tabel di atas menunjukkan bahwa ada dana yang dikeluarkan khusus pendidikan tapi dana itu tidak disalurkan sepenuhnya bahkan hanya beberapa persen saja.

Tabel 1.2 Anggaran Program Urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019

No	Tahun	Tren Alokasi Anggaran Program Urusan Pendidikan Di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)	Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)	
			SD	SMP
1	2017	11,9%	0,4 M	7,9 M
2	2018	13,98%	1,07 M	13, 14 M
3	2019	15,74%	0,00 M	0,00 M

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) meningkat, untuk tahun 2019 meningkat menjadi 15,74% sedangkan untuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 0%. Namun kenyataan dilapangan masih ada anak putus sekolah bahkan tidak sama sekali hal inilah yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemerataan anggaran pendidikan.

Sementara itu amanat yang jelas- jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah (Fauzi dkk, 2012). Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. (Lukman, 2019)

Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak merupakan generasi muda yang nantinya akan mengukir bagaimana bangsa ini kelak. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga karena menentukan arah kemajuan bangsa selanjutnya. Maka dari itu diperlukan adanya strategi dalam proses pendidikan agar kualitas pendidikan benar-benar mampu sesuai dengan harapan. (Islami, 2020)

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Maka dari itu, anak perlu mendapatkan perhatian akan hak-hak yang harus didapatkannya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya, kebutuhan anak akan pendidikan tidak semuanya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Anak putus sekolah merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Kasus anak putus sekolah ini merupakan kasus yang sangat rumit dan masih sulit diatasi sampai sekarang. Banyak faktor yang melatar belakangi anak putus sekolah, diantaranya yaitu faktor keluarga, geografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kesadaran pendidikan dari seluruh pihak, baik dari pihak anak, keluarga maupun pihak lingkungan. Kesadaran akan pendidikan dapat menjadi dorongan yang kuat pada diri anak untuk tetap melaksanakan pendidikannya. Selain itu, pihak yang turut berperan dalam penanggulangan anak putus sekolah adalah pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan diharapkan mampu membantu anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. (Sandhopa, 2019)

Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah suatu instansi pemerintah yang menangani jenjang pendidikan dari SD, SMP, di Kabupaten Indragiri Hilir terkhususnya kecamatan gaung. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah sebagai pelaksana kebijakan teknis pendidikan. Meskipun telah terdapat usaha pemerintah dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan dalam melindungi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Tetapi hal tersebut belum mencukupi seluruh aspek hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pada kenyataan di lapangan masih banyak kita temukan anak yang putus sekolah bahkan sama sekali tidak dapat mengenyam pendidikan. Adapun data anak putus sekolah dari tahun 2017-2019 dan data peserta didik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Anak Putus Sekolah (Tahun)	SD	SMP	Jumlah
1	2017	192	88	280
2	2018	328	150	478
3	2019	193	53	246
	Jumlah	713	291	1.004

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Tabel 1.4 Data Peserta Didik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Peserta Didik		Jumlah
		SD	SMP	
1	2017	75.543	21.359	96.902
2	2018	74.456	20.755	95.211
3	2019	73.365	20.514	93.879
	Jumlah	223.364	62.628	285.992

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Dari data pada tabel 1.3 dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2018 pendidikan cenderung melemah disebabkan tingginya angka anak putus sekolah, sedangkan tahun 2019 cenderung meningkat membaik. Sedangkan pada tabel 1.4 terlihat jelas bahwa dari tahun 2017-2019 jumlah peserta didik menurun menjadi 93.992 yang sebelumnya mencapai 96.902. Dengan membandingkan antara dua data tersebut bisa dilihat bahwa harus ada tindakan ataupun kebijakan dari pemerintah melalui dinas pendidikan agar membentuk strategi penanganan anak putus sekolah.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Hal inilah yang harus di perhatian oleh dinas pendidikan. Dimana sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari dinas pendidikan setempat dalam mengatasi anak putus sekolah.

Maka dari itu banyak anak-anak di Kecamatan Gaung putus sekolah. Masyarakat setempat hanya berpenghasilan dari perkebunan, itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya itu lingkungan juga berpengaruh pada pendidikan dan juga kurangnya perhatian orang tua mengenai pendidikan. Maka dari itulah banyak siswa-siswi Kecamatan Gaung yang putus sekolah. Adapun data jumlah anak putus sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Data Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Putus Sekolah		Jumlah
		Usia		
		SD 8-12 THN	SMP 13-15 THN	
1	Kuala Lahang	0	3	3
2	Teluk Merbau	0	2	2
3	Terusan Kempas	0	2	2
4	Lahang Baru	8	14	22
5	Lahang Tengah	1	4	5
6	Lahang Hulu	3	7	10
7	Sungai Baru	4	3	7
8	Soren	2	1	3
9	Jerambang	0	0	0
10	Pintasan	0	8	8
11	Belantaraya	0	0	0
12	Pungkat	17	27	44
13	Simpang Gaung	15	17	32
14	Semambu Kuning	1	2	3
15	Teluk Kabung	4	5	9
16	Gembira	1	6	7
Jumlah		56	101	157

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwas masih banyaknya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Guang, kondisi anak putus sekolah pada tahun 2020 mencapai angka 157 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya angka anak putus sekolah yang ada di Kecamatan Gaung. Kondisi anak tidak sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan karena dimasa ini seharusnya anak-anak dapat mengenyam pendidikan yang baik.

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang. (Kusbowo, 2016)

Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. (Kusbowo, 2016)

Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. Pemerintah, masyarakat dan lingkungan setempat bertanggung jawab atas terjadinya fenomena anak putus sekolah yang ada di kecamatan Gaung, terlebih khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang harus lebih baik, sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari uraian diatas penulis melihat ada beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Masih adanya anak putus sekolah dikarenakan faktor eksternal yakni ekonomi keluarga yang lemah yang menyebabkan berbagai problem yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup sehingga anak sering diikutsertakan dalam menompang kebutuhan ekonomi keluarga dan pada akhirnya mengganggu kegiatan belajar dan kesusahan mengikuti pelajaran.
2. Belum tercapainya tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, yang mana masih banyaknya anak putus sekolah dalam hal ini terdapat pada Kecamatan Gaung.

3. Masih rendahnya pemerataan anggaran dalam memperoleh pendidikan hal inilah yang menyebabkan kurang optimalnya dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir seperti belum adanya tidak lanjut dari Dinas Pendidikan mengenai anak putus sekolah.
4. Belum adanya solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Indragiri Hilir terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Gaung dan kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan hal ini dibuktikan dengan dihapusnya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan Gaung.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikandiatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **“Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian, dengan: **“Bagaimana Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa saja Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dalam mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terutama akan pentingnya pendidikan. Dan diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam memperhatikan masyarakat putus sekolah.

- b. Aspek Akademisi

Bagi para akademisi dan pembaca, dapat dijadikan sumber atau alternatif dalam mengembangkan pengetahuan Tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan terhadap anak putus sekolah.

- c. Aspek Empiris

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin meneliti dibidang yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Di Indonesia, baik pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah Indonesia menggunakan Ilmu Pemerintahan itu sebagai bahan ajar bagi calon pegawai negeri, khususnya di lingkungan Kementerian (Dapertemen) dalam negeri. Sejak itulah Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu bagi pamong praja atau kader-kader pimpinan pemerintahan di pusat dan di daerah. Dengan perkataan lain, masyarakat mendapat kesan, ilmu pemerintahan itu adalah “ilmunya” pemerintahan, “ilmunya” para pejabat, “ilmunya” dapertemen dalam negeri. (Ndraha, 2005:1)

Menurut Finer (dalam Syafii, 2014:11) Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*proses*), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya

dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. (Syafiie, 2014:12)

Menurut Terry (dalam Syafiie, 2014:22) Pemerintahan sebagai seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki yang bersangkutan dalam tugas fungsinya agai seniman.

Selanjutnya menurut Ndraha, 2002 (dalam Syafiie, 2014:11) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan).

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2013:34-35) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Sedangkan Brasz mengatakan bahwa ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap para warganya.

Secara substantif, menurut Rasyid (dalam Ndraha, 2005:58) makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, ada (3) tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu :

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*)

3. Pembangunan (*development*)

Sedangkan menurut Sigiana (dalam Fitriani, 2018) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi tertentu yakni:

1. Pemerintah sebagai stabilator, baik dalam menjaga stabilator politik, stabilator ekonomi maupun stabilator sosial budaya.
2. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah, inovasi konsepsional dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja.
3. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Poelje). Secara harfiah, maka ilmu pemerintahan memang sejak awal dirancang untuk mengatur tata kerja dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat) untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kemakmuran yang setinggi-tingginya, dengan berpedoman kepada aturan dan perundangan yang berlaku, sehingga pencapaian kebahagiaan tersebut terjadi tanpa merugikan orang lain. (Zainal, 2019)

Selanjutnya menurut Ndara (dalam Labono,2014;37) Pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerles*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan. (Kurniawati, 2015)

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas baik secara sempit dan luas, menunjukkan bahwa baik yang diperintah maupun yang memerintah ada saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan. Relasi dari keduanya kemudian memunculkan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan.

Secara umum tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum warga masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.

Di dalam Ilmu Pemerintahan dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, jadi pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada dikecamatan sedangkan Pemerintah Kecamatan yang berada setingkat lebih tinggi dari Pemerintahan Kelurahan/Desa.

Jadi Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah.

2. Konsep Strategi

Strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. (Taufiqurokhman, 2016:21)

Menurut Cravens (2000) dalam (Kholis, 2014:5) Strategi adalah rencana yang disatukan dan terintegrasi, menghubungkan keunggulan startegi organisasi dan dicapai melalui pelaksanaan yang teppat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Menurut David (dalam Kumara, 2018) Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan yang berorientasi kemas yang akan datang. Strategi mempunyai konskuensi multifungsional atau multidivisional dan perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan.

Menurut Iriantara (dalam Purnamasari, 2017) Strategi merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang dikemudian dijabarkan ke dalam sejumlah

taktik untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. dengan kata lain strategi merupakan rencana dan memberi penjelasan atas metoda yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Strategi adalah cara yang digunakan dalam mengarahkan semua kemampuan dari segenap sumber daya yang ada pada suatu organisasi supaya bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan bahwa strategi merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi. (Aryawana, 2019)

Menurut Andrew (dalam Wurangian,2015) Strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kejadian dan merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicapai serta membuat rincian yang diinginkan. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang dimaksud adalah perumusan (*formulition*), dan pelaksanaan (*implementation*).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut :

1. Tahap perumusan
2. Tahap pemutusan
3. Tahap pelaksanaan
4. Tahap penilaian

Tujuan suatu strategi adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang di

dalam lingkungan, yang memungkinkan menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang kekuatannya. (Nazarudin, 2020)

Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. David (dalam Ribonson, 2019) membagikan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Manajemen
2. Strategi Investasi
3. Strategi Bisnis

Selanjutnya menurut Don Harvey dalam Benjamin,dkk (2017) menyatakan pandangan-pandangan berikut tentang manajemen strategi. Manajemen strategi berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimalkan sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Manajemen strategi meliputi semua aktivitas yang menyebabkan timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategik tersebut.

Menurut Hunger dan Thomas Wheelen (2003) didalam manajemen strategi, terdapat suatu proses. Proses menunjukkan input yang dimasukkan demi pencapaian tujuan organisasi yang harus diproses dan dikendalikan atas dasar output (realisasi) yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh organisasi. Teori Manajemen Strategi ini menjelaskan secara detail dan sistematis

kegiatan manajemen strategi yang terdiri dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi yang secara detail sebagai berikut :

1. Pengamatan lingkungan, yaitu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam organisasi atau faktor internal.
2. Perumusan strategi, yaitu tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh organisasi. Strategi yang dipilih merupakan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan.
4. Evaluasi dan pengendalian, yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.

Berdasarkan teori diatas mengenai strategi disini penulis menggunakan teori Hunger dan Wheelen (2003) yang menyebutkan manajemen dan strategi, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu usaha pengelolaan rencana mulai dari penyusunan rencana sampai evaluasi hasil dari rencana suatu organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan sebuah manajemen strategi, suatu organisasi dapat menciptakan suatu perubahan.

Manajemen Strategis merupakan istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi dan atau bisnis atau manajemen bisnis. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manajemen strategis sudah mulai banyak dan biasa diaplikasikan pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa efektivitas dan efisiensi dapat terwujud pada organisasi publik/pemerintahan. (Nugraha, 2014:9)

Sesuai dengan penjelasan Hunger dan Wheelen (2003) di atas maka penulis menggunakan 4 indikator variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan lingkungan, berupa perubahan, peristiwa, dan perkembangan yang terjadi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.
2. Perumusan strategi, pengambilan keputusan yang akan dipilih untuk mencapai sebuah misi.
3. Implementasi strategi, mewujudkan strategi dan kebijakan melalui beberapa program.
4. Evaluasi dan pengendalian, proses membandingkan kinerja dan hasil yang di inginkan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. (Indartono, 2017:2)

Pendapat Prof. Prajudi (dalam Syafiie, 2013:269) Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prata atau tujuan kerja yang tertentu.

Selanjutnya menurut Terry (dalam Syafiie, 2014:126) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (dalam Kartoyo, 2016:2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Sesungguhnya keempat proses itu merupakan hasil ikhtisar dari pelbagai pendapat praktisi dan ahli mengenai manajemen. (Indartono, 2017:7)

Adapun fungsi utama manajemen, menurut pandangan Bernard (dalam Priyono, 2014;13) adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Barnard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang.

Ada Empat Prinsip Manajemen menurut Taylor (dalam Priyono, 2014) antara lain :

1. Kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang, yang akan menggantikan metode kaidah ibu jan yang lama.
2. Secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah pekerja tersebut. (sebelumnya, para pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri mereka sendiri semampu mereka)
3. Bekerjasamalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang dikembangkan tadi.
4. Bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara pimpinan dengan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja.

Sementara menurut Herrington Emerson (dalam Priyono, 2014) melihat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri ialah adanya masalah pemborosan dan in-efisiensi. Oleh karena itu dia mencetuskan ide-ide yang terformulasikan dalam 12 prinsip sebagai berikut:

1. Perumusan tujuan dengan jelas.
2. Kegiatan yang dilaksanakan masuk akal.
3. Tersedianya staf yang cakap.
4. Terciptanya disiplin kerja.
5. Pemberian balas jasa yang adil.
6. Laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinyu.
7. Pemberian instruksi perencanaan dari urutan-urutan kerja.
8. Adanya standar-standar dan skedul, metode dan waktu setiap kegiatan.
9. Kondisi yang standar.
10. Operasi yang standar.
11. Intruksi-intruksi praktis tertulis standar.
12. Balas jasa efisien rencana insentif.

Menurut definisi diatas manajemen dapat pula diartikan sebagai kegiatan mengurus, membimbing serta mengarahkan agar suatu tujuan dapat tercapai. Suatu tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan banyak aspek yang menjadi penentu yang terikat satu sama lainnya, diantaranya adalah pemimpin yang profesional, sarana yang memadai, waktu yang tersedia, dana yang mencukupi, dan dilaksanakan melalui tata pelaksanaan manajemen yang baik.

Selanjutnya menurut Camdessus (dalam Widanarto, 2016) manajemen pemerintahan sebagai suatu rangkaian proses dari pembangunan politik menuju pemerintahan yang demokratis, artinya adanya *accountabilty* (akuntabilitas), *transparancy* (transparan), *opennes* (terbuka) dan *rule of law* (berdasarkan hukum yang berlaku).

Menurut Ndraha (dalam Purnamasari, 2018) Manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang dijalankan terus menerus dan berturut-turut untuk mencapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Ndraha adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemerintahan. Dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan yang kongkrit dan terukur.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan adalah realisasi langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, sebelum digunakan harus diorganisir agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan dilakukan untuk mengerakan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan adalah dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan daya tersebut.

Persoalan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dapat diurai dengan menggunakan konsep-konsep manajemen. Indikator yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dari aspek manajemen bisa dijelaskan secara ilmiah. Konsep manajemen yang demikian inilah yang dikenal sebagai konsep manajemen secara ilmu. Manajemen secara ilmu memang dapat dipelajari dan dikembangkan dengan

baik sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menjalankan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

4. Konsep Pendidikan

Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik bagi dirinya, dan kemampuan tersebut akan berkembang secara optimal jika diberi kesempatan. Peran pendidik bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pengembangan kemampuan peserta didik dengan cara melihat kemampuan masing-masing individu peserta didik yang memiliki kemampuan bervariasi. (Lukman Hakim, 2018:1)

Dalam arti sederhana pendidikan menurut Hasbullah (dalam Kusbowo, 2016) sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut Nasution (dalam Kusbowo, 2016) Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan berkaitan dengan transmisi pengetahuan sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda.

Menurut Langeveld (dalam Sulfemi, 2018) Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju

kepada kedewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Menurut Dewantara (dalam Yusuf, 2018;8) Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. (Rahmat Hidayat, 2019:25)

Menurut Panagan (dalam Saputra, 2017) Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel susah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara Negara. Terbukti bahwa seluruh bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuan

kebudayaan dan teknologi tinggi mesti disangga oleh kualitas pendidikan yang sangat kokoh.

Menurut Hasan (dalam Firdaus, dkk, 2018) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pendidikan merupakan institusi pendidikan formal, dan institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat kita ialah sekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang persekolahan sampai ke jenjang pendidikan tinggi yang bersifat umum maupun khusus. (Sunarto, 2004:65)

Adapun fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah. (Fitriani, 2018)

Menurut Dewey (dalam Hasbullah, 2017;2) Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Rousseau juga berpendapat pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

Menurut Marimba (dalam Hasbullah, 2017;3) Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menjadi terbentuknya keperibadian yang utama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini adalah:

1. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar;
2. Ada pendidik, pembimbingan atau penolong;
3. Ada yang terdidik atau si terdidik;
4. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan;
5. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.

Selanjutnya macam-macam tujuan pendidikan (Yusuf, 2018;31-32) sebagai berikut :

1. Tujuan umum; Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakekat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal.
2. Tujuan Khusus; Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Tujuan khusus biasanya ditentukan karena adanya faktor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. Misalnya perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal.

Menurut Dwi Nugroho Hidayanto (dalam Yusuf, 2018;34) yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu meliputi:

1. Orang dewasa
2. Orang tua
3. Guru
4. Pemimpin masyarakat
5. Pemimpin agama

Pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai sehingga memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan negara. Kualitas pendidikan terutama ditentukan oleh proses pendidikan yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan. (Lukman Hakim, 2018:2)

Arti penting pendidikan, menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. (Yusuf, 2018;9)

Dari definisi di atas, terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya.

5. Konsep Anak Putus Sekolah

Singgih (dalam Rahmad dkk, 2016) mengemukakan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga tempat dia belajar. Artinya adalah keterlantarannya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. (Rahmad M, dkk, 2016)

Menurut Musfiqon (dalam Saputra, 2017) Putus Sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.

Menurut Ahmad (dalam Rizqa, 2015) bahwa, yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti.

Selanjutnya Salim dalam Kusbowo, 2016) anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran kerana sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh

kembang anak tanpa memperhatikan yang hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (Wassahua, 2016)

Menurut Darmaningtyas (dalam Dewi dkk, 2014), fenomena putus sekolah adalah suatu keadaan terhentinya aktivitas pendidikan pada anak-anak usia sekolah, baik itu pendidikan formal maupun

Sedangkan menurut Ahmad (dalam Wassahua, 2016)) menyatakan bahwa ada beberapa faktor menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu :

1. Adat istiadat tertentu
2. Lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya
3. Kecilnya pendapatan orang tua
4. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah

Selanjutnya Halik (dalam Tamrin, 2020) menguraikan beberapa faktor penyebab anak putus sekolah antara lain yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Dari dalam diri. Anak putus sekolah diakibatkan malas untuk pergi sekolah karena merasa rendah diri, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, sering diledek karena tidak sanggup membayar kewajiban biaya sekolah yang disebabkan oleh

beragam faktor. Lemahnya ekonomi keluarga dalam menanggung biaya pendidikan akan berdampak pada masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa beradaptasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya.

- b. peranan lingkungan Karena pengaruh teman yang mengajaknya untuk bermain seperti play stasion hingga akhirnya sering absen dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan akhirnya malu pergi kembali ke sekolah.
- c. Anak yang dapat sanksi karena membolos sekolah sehingga terkena Droup Out.

2. Faktor Eksternal

- a. Keadaan status ekonomi keluarga, dalam keluarga yang lemah secara ekonomi rentan timbul berbagai problem yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup anak sehingga anak sering dilikutsertakan dalam menopang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga masalah finansial ini membebani si anak yang pada akhirnya mengusik kegiatan belajar dan kesusahan mengikuti pelajaran.
- b. Perhatian orang tua. Kurangnya atensi orang tua rentan akan memicu berbagai persoalan. Semakin besar anak, atensi orang tua semakin dibutuhkan, dengan cara dan variasi yang sesuai dengan kemampuan. Anak menjadi nakal salah satu akibat dari kurangnya atensi orang tua.

- c. Kurang harmonisnya hubungan orang tua, Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini mengawali anak mendapatkan permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga menyebabkan anak mengalami putus sekolah.

Secara keabsahan putus sekolah mengandung arti tidak adanya hubungan lagi dengan sekolah, sebagaimana dalam definisi yang dikemukakan Shohib (dalam Thalib, 2013) bahwa “putus sekolah adalah keadaan tidak melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan formal, baik karena dikeluarkan dari sekolah, atau karena tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang formal berikutnya yang lebih tinggi dengan berbagai alasan.

Menurut Imron (dalam Rembulan & Afdhal, 2019) menyatakan yang dimaksud anak putus sekolah adalah anak yang telah dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Menurut Gunawan (dalam Murtia & Hak, 2019) Putus sekolah merupakan prediket yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak menyelesaikan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Anak putus sekolah adalah anak yang tidak dapat menyudahi program belajarnya hingga tuntas dimana seharusnya ia mengenyam pendidikan atau duduk dibangku sekolah. Akan tetapi dikarenakan berbagai hal ia tidak dapat

menyudahi program belajarnya hingga tuntas. Sudah sepantasnya anak-anak putus sekolah ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah, disebabkan mereka adalah generasi penerus bangsa, yang seharusnya mereka dapat memperoleh hak bersekolah dan mengembangkan kemampuan dan keinginan mereka agar dikemudian hari mereka dapat hidup sejahtera. (Tamrin, 2020)

Sedangkan menurut Ungureanu (dalam Wijaya, 2018) Putus sekolah lebih awal berarti siswa tersebut tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama, pendidikan wajib dan tidak memperoleh kualifikasi atau diploma. Putus sekolah lebih awal menyiratkan melepaskan segala bentuk pendidikan dan mengacu pada anak muda yang melepaskan sekolah sebelum menyelesaikan wajib studi; menyelesaikan sekolah wajib tapi tidak mendapatkan kualifikasi setelah tingkat menengah atas; mengikuti kursus pelatihan profesional tanpa mencapai kualifikasi setara di tingkat menengah atas.

Fenomena putus sekolah adalah suatu keadaan terhentinya aktivitas pendidikan pada anak-anak usia sekolah, baik pendidikan formal ataupun pendidikan informal sebelum mendapat sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan dalam masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian terdahulu yang relevan tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aldo Bayu Satrio	Strategi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Blitar	Sama-sama menggunakan teori strategi (Hunger dan Thomas Wheelen, 2003)	Fenomena penelitian terdahulu tentang keterbatasan sarana dan prasana yang diberikan oleh pemerintah sehingga kurangnya kualitas pendidikan di Kota Blitar. Sementara fenomena penelitian ini tentang strategi mengatasi anak putus sekolah.
2	Morin Benjamin Agustinus Pati Frans Singkoh	Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung	Sama-sama menggunakan teori manajemen stratgi (Don Harvey)	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Bitung. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
3	Rio Kusbowo	Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2011-2012)	Isu penelitian sama-sama membahas tentang anak putus sekolah	Isu penelitian terdahulu tentang upaya pemerintah dalam pengentasan anak putus sekolah. Sementara penelitian ini tentang strategi dinas pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah.
4	Ricardo Saputra	Peran Dinas Pendidikan Kota	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian terdahulu menggunakan konsep peran, sementara

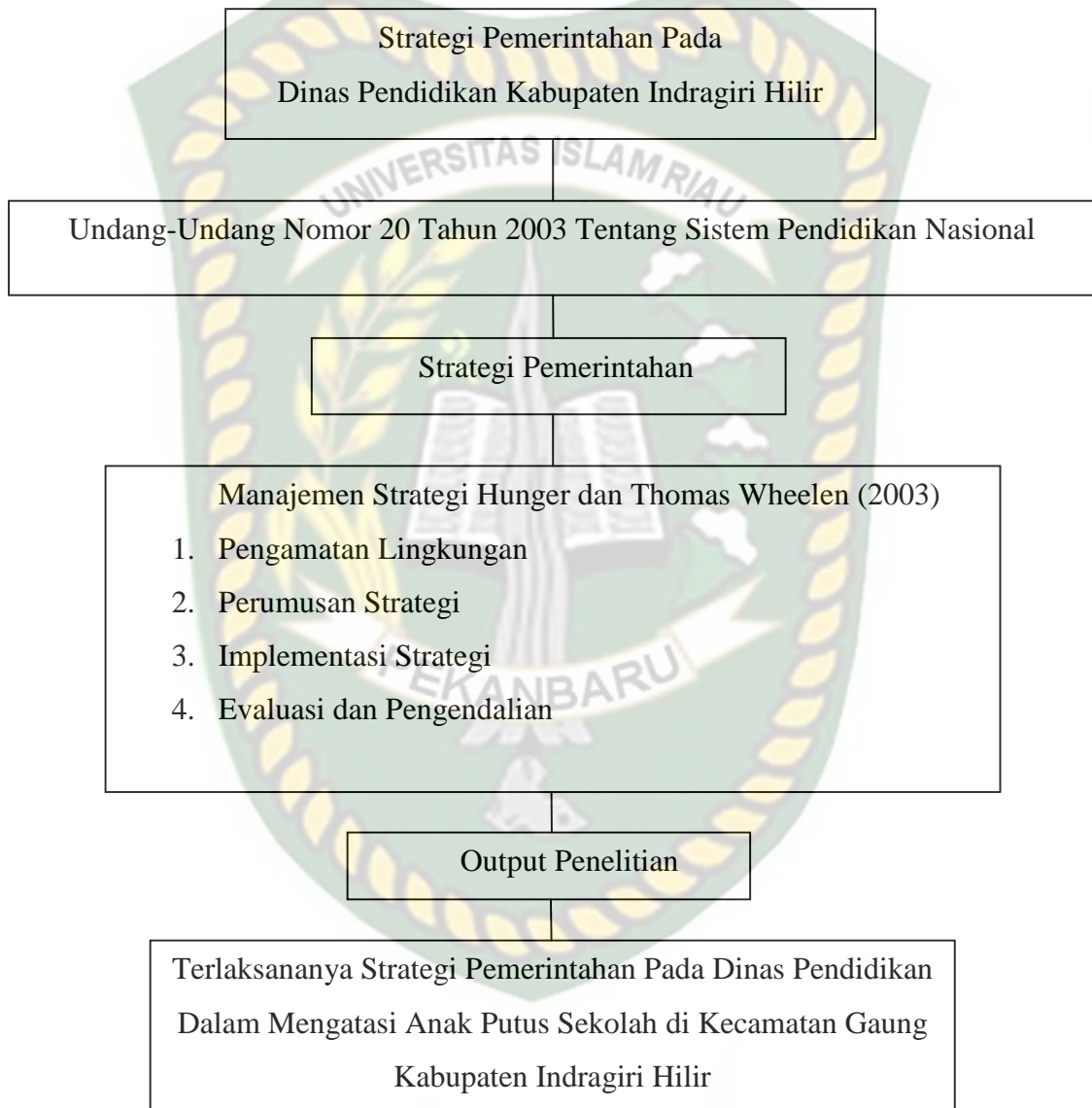
		Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2012- 2015	anak putus sekolah	penelitian ini menggunakan konsep strategi.
5	Meta Rizki Putri Firdaus Dr. Saiman, M.Si Drs. Krishno Hadi. MA	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS Di Kota Malang)	Fenomena penelitian membahas anak putus sekolah	Isu penelitian terdahulu membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan anak putus sekolah, sementara penelitian ini mengenai strategi dinas pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah.
6	Irwan Lukman	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun	Isu penelitian sama-sama membahas tentang program wajib belajar	Penelitian terdahulu menggunakan konsep implementasi sementara penelitian ini menggunakan konsep strategi
7	Nendy Oktama Rosa R	Pengelolaan Anak Putus Sekolah Melalui PKBM Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Di Kecamatan Suhaidi Kabupaten Kapas Hulu (Studi Kasus Pada Anak Tingkatan SD)	Fenomena anak putus sekolah	Penelitian terdahulu terfokuskan pada pengelolaan anak putus sekolah melalui pkbm, sedangkan penelitian ini membahas strategi mengatasi anak putus sekolah
8	La Mangutara La Iba	Strategi Penanganan	Fenomena penelitian	Penelitian terdahulu merumuskan dan

		Anak Putus Sekolah Pada Suku Bajo Melalui Optimalisasi Peran Komite Sekolah Di Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna	sama-sama anak putus sekolah	melaksanakan penanganan anak putus sekolah melalui peran komite sekolah, sedangkan penelitian ini menggunakan peran strategi Dinas Pendidikan
9	Jefri Adi Sanjaya	Efektifitas Strategi Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya	Penelitian ini sama-sama menggunakan konsep strategi	Penelitian terdahulu efektifitas strategi kebijakan penanganan anak putus sekolah, sementara penelitian ini hanya terfokus ke strategi saja
10	Ahmad Fauzi Andi Gau Kadir Andi Murfhi	Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo	Fenomena penelitian ini sama-sama membahas anak putus sekolah yang disebabkan dari faktor internal dan eksternal	Penelitian terdahulu menganalisis peranan pemerintah daerah terhadap anak putus sekolah, sementara penelitian ini Strategi Dinas Pendidikan

Secara garis besar bisa dilihat bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai anak putus sekolah, yang melibatkan peran dan strategi baik dari dinas pendidikan maupun di pemerintahannya itu sendiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta tingkat pada jenjang pendidikan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dipakai diantaranya :

1. Strategi merupakan proses penentuan rencana yang telah ditentukan guna meningkatkan kegiatan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.
2. Strategi Pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi pemerintahan pada dinas pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Indragiri Hilir yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah dan pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi anak putus sekolah.
3. Pengamatan lingkungan, yaitu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam organisasi atau faktor internal.
4. Perumusan strategi, yaitu tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh organisasi. Strategi yang dipilih

merupakan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.

5. Implementasi strategi, yaitu pelaksanaa strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan.
6. Evaluasi dan pengendalian, yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.
7. Manajemen pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah pada tataran pemerintahan daerah.
8. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran bagi peserta didik dengan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang aktif dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri.
9. Anak putus sekolah yang dimaksud penelitian ini adalah berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar dengan kata lain terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal maupun non formal yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, faktor lingkungan, faktor pergaulan serta kurangnya minat bakat untuk memperoleh pendidikan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Hunger dan Thomas Wheelen (2003) dalam Satrio (2016) menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan manajemen strategi yang terdiri dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi dan evaluasi yang detail.	Strategi Dinas Pendidikan	1. Pengamatan Lingkungan	a. Memberikan solusi terkait anak putus sekolah b. Ketersediaan anggaran untuk anak putus sekolah
		2. Perumusan Strategi	a. Membuat program terkait anak putus sekolah b. Langkah-langkah dalam mengatasi anak putus sekolah
		3. Implementasi Strategi	a. Membuat kebijakan program untuk anak putus sekolah b. Membuat proses penganggaran untuk anak putus sekolah
		4. Evaluasi dan Pengendalian	a. Pengaruh dan pemanfaatan beasiswa b. Ketersediaan sarana dan prasarana

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif mencakup komentar-komentar oleh peneliti tentang perannya, dan jenis khusus strategi kualitatif yang digunakan. Selain itu karena struktur penulisan kualitatif mungkin cukup bervariasi antara satu penelitian dengan lainnya, bagian metode seyogiannya juga memasukkan komentar-komentar tentang sifat hasil tulisan akhirnya. (Creswell, 2017;247)

Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. (Creswell, 2017;24)

Berdeasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan banyaknya angka anak putus sekolah di kecamatan gaung dan penelitian ini difokuskan pada anak putus sekolah tingkatan SD dan SMP yang ada di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Informan Dan Key Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti.

Dengan ini penulis menemukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang, yang terbagai menjadi 2(dua) orang sebagai informan formal dan 4(empat) orang sebagai informan informal.

Tokoh formal yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan Inhil dan Camat Gaung. Sedangkan tokoh informal yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 4(empat) orang tua anak putus sekolah perwakilan dari kecamatan gaung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. I Informan dan Key Informan

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hilir	H. Faturrahman,S.Ag.,M.,Pd	1
2	Camat Gaung	Said Zulfahmi, SE	1
3	Orang Tua Anak Putus Sekolah	1. Siti Zainap 2. Nur Baiti 3. Fauzi 4. Yusrita	4
Jumlah			6 Orang

Sumber : *Data Olahan Peneliti, 2020*

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis Dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai

sampel, yang di dapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara, dan observasi.

2. Data sekunder

Yaitu data dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini meliputi :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi dinas pendidikan dan kecamatan
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan tekni-teknik pengeumpulan data antara lain :

1. Wawancara Kualitatif

Wawancara yang dimaksud Creswell (2014;254) yaitu peneliti melakukan *face-to-face interveiw* (wawancara berhadap-hadapan)d dengan partisipan, wawancara mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok).

2. Observasi Kualitatif

Observasi adalah ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. (Creswell, 2014;254)

Observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.

3. Dokumentasi Kualitatif

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, e-mail). (Creswell, 2014;255)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri dan orang lain.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 – 2021															
		Agustus - Oktober				November				Desember				Januari-April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan UP	■	■														
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■	■												
4	Revisi UP					■	■										
5	Rekomendasi survey							■	■								
6	Survey lapangan									■	■	■	■				
7	Analisis data												■				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian													■	■		
9	Konsultasi revisi skripsi														■	■	
10	Ujian komprehensif skripsi															■	■
11	Revisi skripsi																■
12	Penggandaan skripsi																■

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² dengan jumlah penduduk 749 813,00 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis. Indragiri Hilir terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan/Parit” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai.

Secara astronomis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0⁰ 36’ Lintang Utara dan 1⁰ 07’ Lintang Selatan, dan 104⁰ 10’-102⁰ 32’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Pelalawan,
- b. Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- c. Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Timur : Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir). Adapun makna kata Indragiri Hilir yaitu masa depan kejayaan di laut dan di sungai dengan semangat yang tidak kunjung padam. Kabupaten yang ber Ibu kota Tembilahan ini dikenal dengan “Negeri Seribu Parit” karena daerahnya yang dikelilingi oleh sungai dan rawa. Selain itu, Indragiri Hilir juga di kenal di dunia dengan hasil pertaniannya, yaitu kelapa, sehingga dijuluki dengan “Hampan Kepala Dunia”.

Penghasilan terbesar Kabupaten Indragiri Hilir adalah perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektare yang tersebar di kepulauan kelapa. Wilayah Kateman atau yang lebih di kenal dengan sebagai Sungai Guntung adalah Kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas disana. Kebun-kebun ini adalah milik PT. Pulau Sambu, sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir. Selain kelapa sebagai hasil bumi kabupaten ini, kelapa sawit juga menjadi sumber daya alam terdapat banyak di barat kabupaten ini seperti di kecamatan tempuling, enok, kempas jaya dan teluk kiambang salag satu desa penghasil sawit terbesar di kabupaten ini. (Hajiji, 2019)

Berikut daftar Kecamatan dan luas wilayah per Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri hilir :

Tabel 4. 1 Luas Dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
	<i>Subdistrict</i>	<i>Total Area (square.km)</i>	<i>Percentage</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Keritang	543.45	4.68
2	Kemuning	525.48	4.53
3	Reteh	407.75	3.51
4	Sungai Batang	145.99	1.26
5	Enok	880.86	7.59
6	Tanah Merah	721.56	6.22
7	Kuala Indragiri	511.63	4.41
8	Concong	160.29	1.38
9	Tembilahan	197.37	1.70
10	Tembilahan Hulu	180.62	1.56
11	Tempuling	691.19	5.96
12	Kempas	364.49	3.14
13	Batang Tuaka	1,050.25	9.05
14	Gaung Anak Serka	612.75	5.28
15	Gaung	1,021.74	8.80
16	Mandah	1,479.24	12.75
17	Kateman	561.09	4.83
18	Pelangiran	531.22	4.58
19	Teluk Belengkong	499	4.30
20	Pulau Burung	520	4.48
	Indragiri Hilir	11 605,97	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Setiap Organisasi atau Instansi Pemerintahan harus mempunyai suatu rencana, pandangan dan pencapaian untuk masa depan dalam menangani dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan dengan kata lain visi dan misi bertujuan untuk setiap yang di laksanakan terstruktur dan sesuai dengan sistematis, strategi dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Visi : Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang

Misi :

1. Mewujudkan Daya Saing Daerah.
2. Mewujudkan Suasana Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Demokrasi.
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Hasil-Hasilnya.
4. Mewujudkan Suasana Aman, Damai, dan Harmonis Yang Bermoral Beretika dan Berbudaya.
5. Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Peran penting pada Tingkat Tegional Nasional dan Internasional.

B. Profil Singkat Kecamatan Gaung

Kecamatan Gaung yang ber Ibu Kota Kuala Lahang merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang memiliki 16 Desa dan satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari wilayah Administrasi Kecamatan Gaung Anak Serka yang secara definitif sejak 5 Januari 1996.

Adapun asal mula kata Kelurahan Kuala Lahang berasal dari kata lalang yang di karenakan disepanjang tepi sungai ditumbuhi rumput ilalang lebih kurang 500 M, sehingga penduduk yang ada waktu itu memberi nama Lahang.

1. Geografis dan Batasan Wilayah Kecamatan Gaung

Wilayah Kecamatan Gaung berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandah.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gaung Anak Serka, Tempuling dan Kempas.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandah dan Pelangiran.

Kecamatan Gaung mempunyai luas wilayah 1.021,74 km² dan Tinggi pusat Wilayah Kecamatan Gaung dari permukaan laut adalah s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah, pidada, rasau dan berbagai tumbuhan rawa lainnya. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut, tanah liat dan endapan sungai serta rawa-rawa. (Hajiji, 2019)

2. Keadaan Penduduk

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang lainnya. (Hajiji, 2019)

Kepadatan penduduk di Kecamatan Gaung adalah 41 jiwa per km². Penduduk Gaung pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang

Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan, sebagian lainnya bergerak dibidang Perdagangan, Nelayan dan Kerajinan Industri. (Hajji, 2019)

Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan (Jiwa)

No	Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan (Jiwa)	
	Wilayah	Tahun 2020
1	Keritang	69 181,00
2	Kemuning	36 050,00
3	Reteh	46 992,00
4	Sungai Batang	13 138,00
5	Enok	36 772,00
6	Tanah Merah	33 087,00
7	Kuala Indragiri	20 837,00
8	Concong	14 487,00
9	Tembilahan	79 178,00
10	Tembilahan Hulu	48 940,00
11	Tempuling	33 322,00
12	Kempas	37 138,00
13	Batang Tuaka	29 838,00
14	Gaung Anak Serka	23 692,00
15	Gaung	43 309,00
16	Mandah	42 265,00
17	Kateman	50 050,00
18	Pelangiran	49 368,00
19	Teluk Belengkong	18 502,00
20	Pulau Burung	23 667,00
	Indragiri Hilir	749 813,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Kecamatan Gaung memiliki 70 sarana pendidikan yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan, terdiri atas 46 sekolah tingkat Sekolah Dasar

(SD)/Sederajat, 18 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat, dan 6 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 21 sekolah yang terdiri dari 19 Kelompok Bermain (KB) dan 2 Taman Kanak-kanak (TK).

b. kesehatan

Kesehatan Kecamatan Gaung memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan yaitu 1 puskesmas, 14 puskesmas pembantu, 36 posyandu dan 2 praktek tenaga kesehatan. Dari segi jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Kecamatan Gaung terdapat 53 profesional yang terdiri atas 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 38 orang bidan, dan 13 perawat.

c. agama

Agama Mayoritas penduduk Kecamatan Gaung adalah beragama Islam dimana terdapat 64 Masjid dan 45 Mushola. Selain itu juga terdapat Vihara sebanyak 1 buah di Desa Kuala Lahang. (Hajiji, 2019)

C. Dinas Pendidikan Indragiri Hilir

Pendidikan merupakan investasi bangsa yang menjadi modal pembangunan, sukses tidaknya pendidikan akan menentukan keberlangsungan bangsa dan masa depan. Menyadari peran strategisnya, maka pendidikan merupakan sektor terpenting dan prioritas dalam pembangunan. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Mutu pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif masih rendah, sarana dan prasarana pendidikan belum optimal, fasilitas gedung perguruan tinggi masih terbatas. Pendidikan merupakan pilihan utama dalam mengembangkan suatu daerah sebab pendidikan merupakan institusi penting bagi proses penyiapan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan adanya pembaharuan pendidikan yang relevan dengan tuntutan pembangunan. Maka dari itu ada 4 strategi pokok pendidikan yaitu:

1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Relevansi pendidikan dengan pembangunan;
3. Kualitas pendidikan,
4. Efisiensi pengelolaan pendidikan

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu terwujudnya Lembaga Pendidikan Kabupaten di Indragiri Hilir yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. beriman dan bertqwa, berakhlak mulia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. beretos kerja mandiri, berbudaya dan memiliki daya saing pada tahun 2020. Visi ini akan tercapai dengan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya.
2. Meningkatkan keimanan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing.

3. Menciptakan sistem dan iklim pendidikan dan pengajaran yang demokratis transparan dan merata. (Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020)

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 5 menyatakan bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Terdiri Dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan
3. Bidang Paud & DIKMAS
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
6. Bidang Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan
7. Koodinator Wilayah
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Kantor Dinas Kabupaten Indragiri Hilir, 2020)

E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pengembangan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan pengembangan Pendidikan secara berkesinambungan untuk pemantapan sistim pendidikan yang berkualitas
- b. Merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan berdasarkan skala prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia
- c. Meyusun kebijakan teknis pengembangan pendidikan secara berjenjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit
- d. Mengorganisir pengembangan pendidikan melalui mekanisme.prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit
- e. Mengendalikan pelaksanaan sistim pengembangan pendidikan secara terpadu untuk peningkatan mutu pendidikan
- f. Mengarahkan pelaksanaan program sistem pengembangan mutu pendidikan proses belajar mengajar secara inovatif untuk peningkatan mutu pendidikan
- g. Memberikan pelayanan teknis perizinan dibidang pendidikan sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum
- h. Membina pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit

- i. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit.
- k. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi
- o. Melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diperintakan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan;

- b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur;
- g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Badan yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
- j. Mengevaluasi tidak lanjut rapat-rapat intern;
- k. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 3) Memberi petunjuk kepada bawahan;
 - 4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;
 - 5) Menilai kinerja bawahan;
 - 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - 7) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- 8) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 9) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 10) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 11) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 13) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 14) Mengumpul dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran SKPD;
- 15) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- 16) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA SKPD;
- 17) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD;

18) Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan;

19) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;

20) Melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

21) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian.

b. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

2) Membagi tugas kepada bawahan;

3) Memberi petunjuk kepada bawahan;

4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;

- 5) Menilai kinerja bawahan;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- 7) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 8) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 10) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 11) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 13) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 14) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup bidang umum dan kepegawaian;

- 15) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolanan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, dan penyelenggaraan rumah tangga;
- 16) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya.
- 17) Melaksanakan pengelolaan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai.
- 18) Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;
- 19) Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan bidang umum dan kepegawaian;
- 20) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang umum dan kepegawaian; dan
- 21) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya:

3. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan perlengkapan.
- b. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 3) Memberi petunjuk kepada bawahan;
 - 4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan;
 - 5) Menilai kinerja bawahan;
 - 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - 7) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 8) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 9) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;

- 10) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 11) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait
- 12) pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 14) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 15) Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 16) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup bidang keuangan dan perlengkapan;
- 17) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM.
- 18) Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS.
- 19) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan.
- 20) Melaksanakan penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan aset.

- 21) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan.
- 22) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll untuk kebutuhan.
- 23) Mengadministrasikan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk Inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan.
- 24) Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncturan yang dikelola.
- 25) Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 26) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan perlengkapan;
- 27) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Paud & DIKMAS

- a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
 - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- 4) Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- 5) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- 6) Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PAUD & DIKMAS terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
2. Seksi Pendidikan Masyarakat
3. Seksi Sarana dan Prasarana Anak Usia Dini

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa) ;
 - 2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan

Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;

- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa) ;
- 4) Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- 5) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- 6) Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar

Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;

- 7) Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan Tk, Sd dan Plb Sd
2. Seksi Peserta Dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa
3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan

prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- 2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

- 4) Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 5) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 6) Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

- 7) Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Pertama Luar Biasa
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP & SMLB
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

6. Bidang Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan

- a. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan

Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

- 4) Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 5) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 6) Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;

- 7) Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Guru Ddn Tenaga Kependidikan terdiri dari :

- 1) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
- 2) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Dasar Luar Biasa
- 3) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Gaung yang menjadi objek penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang di harapkan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yakni : Kepala Dinas Pendidikan, Camat Gaung, Orang Tua Anak Putus Sekolah.

Identitas Informan diperlukan untuk memberi informasi dan gambaran yang akurat dalam hasil penelitian ini. Adapun identitas informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan beberapa unsur, untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel dibawah ini mengenai tingkat pendidikan :

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan Responden	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1	Kepala Dinas Pendidikan Indragiri hilir	0	0	0	0	0	1	1
2	Camat Gaung	0	0	0	0	1	0	1
3	Orang Tua Anak Putus Sekolah	1	3	0	0	0	0	4

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.I diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan yang cenderung berbeda yang berjumlah 1 orang dengan lulusan sarjana, 1 orang lulusan Magister dan 1 orang lulusan Sekolah Dasar (SD), 3 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dapat disimpulkan pada tingkat keseluruhan pendidikan informan di atas termasuk memiliki pendidikan yang cukup baik.

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan, selain itu umur juga berpengaruh pada kinerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola fikir, ringkat ketelitian dalam kerja, dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu kerjaan. Untuk lebih jelas bisa di lihat pada tabel di bawah ini mengenai umur informan, sebagai berikut :

Tabel V. II Jumlah Informan Berdasarkan Umur

No	Jabatan Responden	Tahun Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	60	
1	Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hilir	0	0	0	1	0	1
2	Camat Gaung	0	0	0	1	0	1
3	Orang Tua Anak Putus Sekolah	0	1	2	1	0	4

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.II diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan informan yang berusia 30-39 berjumlah 1 sedangkan informan yang berusia 40-49 berjumlah 2 orang dan informan yang berusia 50-59 berjumlah 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa umur rata-rata informan berada pada tingkat umur 50-59 tahun.

B. Hasil penelitian dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dengan judul Startegi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Maka data responden berupa pengumpulan data yaitu wawancara setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan mendapatkan hasil penelitian.

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan organisasi atau instansi pemerintah yang ada di daerah Kabupaten/Kota yang harus tampil sebagai pamong masyarakat dalam bidang pendidikan agar dapat meningkatkan partisipasi aktif di masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Gaung dalam

menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul di bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengetahui Strategi Pemerintahan pada Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah melalui indikator yang di kemukakan oleh Hunger dan Thomas Wheelen (2003) yang mengatakan bahwa di dalam manajemen strategi, terdapat suatu proses. Proses menunjukkan input yang dimasukkan demi pencapaian tujuan organisasi yang harus di proses dan dikendalikan atas dasar output (realisasi) yang di sesuaikan dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh organisasi. Teori manajemen strategi ini menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan manajemen strategi yang terdiri dari :

1. Pengamatan Lingkungan
2. Perumusan Strategi
3. Implementasi Strategi
4. Evaluasi dan Pengendalian

Untuk melihat Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan adalah suatu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, serta perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar lingkungan maupun dalam lingkungan yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal.

Pada indikator pengamatan lingkungan dapat dijelaskan mengenai tanggapan tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Pengamatan Lingkungan sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana pemberian solusi terkait anak putus sekolah jika dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Dalam upaya mengantisipasi terjadinya anak putus sekolah yaitu kita tetap melakukan koordinasi dan himbauan kepada kelompok kepentingan, terutama kepada kepala sekolah dan majelis guru, untuk bagaimana memberikan motivasi yang besar kepada anak-anak agar tetap bersekolah”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana tanggapan Bapak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah ini, sebagai berikut :

“Untuk faktornya sendiri itu bisa ekonomi dan pengaruh lingkungan sekitar, contoh kecil saja teman bermain kita tidak banyak sedikit kita pasti pasti terpengaruhi seperti game online yang berawal dari teman bermain. Jadi jangan di anggap lingkungan tidak berbeangaruh besar terhadap anak. kedua Ekonomi memang ekenomi kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus kaya untuk mensekolahkan anaknya, kurang mampu juga bisa bersekolah asalkan ada kemauan. Kita dari dinas sudah menyediakan alternatif sekolah berbentuk paket dan marginal gunanya untuk yang tidak bersekolah bisa mengenyam pendidikan”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Lanjutan wawancara bersama dengan Bapak Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang anggaran yang di sediakan untuk mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

“Untuk anggaran memang belum ada dari kita dinas pendidikan Kabupaten Inhil khususnya anggaran untuk mengatasi anak putus sekolah. Tapi kita menyediakan sekolah bagi yang terkendala ekonomi seperti misalnya untuk Pendidikan Sekolah dasar kita menyediakan paket A dan paket B, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama kita menyedikan Sekolah Marginal bagi daerah-daerah sulit seperti kecamatan guang”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dari pihak dinas pendidikan sendiri telah melakukan koordinasi dan himbauan kepada kepala sekolah dan guru dalam upaya memberikan solusi untuk mengantisipasi terjadinya anak putus sekolah khususnya di Kecamatan Gaung. Kemudian mengenai anggaran memang belum ada untuk mengatasi anak putus sekolah maka dari itu dari pihak dinas pendidikan memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu bersekolah untuk

mengambil paket A dan B serta menyediakan sekolah marginal bagi Usia sekolah menengah pertama yang terkendala dengan berbagai faktor.

Kemudian wawancara bersama Bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung tentang bagaimana solusi dalam mengatasi anak putus sekolah, sebagai berikut :

“Jadi putus sekolah disini di pengaruhi dua faktor pertama, orang tua mampu anak mau, kedua, anak mau orang tua tak mampu dan juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan ekonomi. Kalau kita lihat di Gaung ini memang begitu umumnya lulus SD asalkan bisa baca dan tulis dah tak mau sekolah lagi atau tak disekolahkan. Masyarakat berpikiran bahwa sekolah tinggi-tinggi hanya banyak makan biaya saja. Begitulah budaya fikir orang sini, Bapak maunya tidak ada lagi orang tua berfikiran seperti itu kita hidup di zaman modren bukan lagi zaman premitif atau zaman dahulu semuanya sudah berubah dan maju. Jadi solusi dari Bapak bekerjasama dengan sekolah beserta majelis guru dan turun langsung kelapangan bersama kasi dan kesus supaya Kecamatan Gaung tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Lanjut wawancara bersama Camat Gaung mengenai anggaran yang disediakan untuk mengatasi anak putus sekolah, sebagai berikut :

“Untuk anggaran khususnya untuk anak putus sekolah kami belum ada karna memang kami ngikut dari atasan jika ada anggaran untuk mengatasi anak putus sekolah kami hanya meng implementasikan atau pun menjalankan sesuai arahan dari atasan. Seperti adanya paket A,B dan Sekolah marginal kami hanya mendata berapa jumlah orang yang mengambil paket dan sekolah Marginal. APBD digunakan sesuai kebutuhan perwilayah saja”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Bedasarkan hasil wawancara bersama Camat Gaung bahwasanya untuk memberikan solusi terkait anak putus sekolah kami akan bekerja sama dengan sekolah dan semua guru yang ada di Gaung. Dan untuk anggaran untuk mengangai anak putus sekolah belum ada dan hanya berharap pada sekolah yang ada seperti sekolah yang disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Siti Zainap salah satu masyarakat orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama tentang alasan mengapa anak Ibu tidak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebagai berikut :

“Kami keluarga tak mampu, tapi untuk pendidikan anak Ibu usahakan untuk bersekolah bagaimanapun caranya, karna Ibu tidak mau anak bapak jadi seperti bapaknya, Ibu mau anak ibu lebih tinggi dari kami. Masalahnya ada pada anak saya sendiri yang tidak mau bersekolah dia bilang sekolah itu capek, saya mau bekerja saja. Dengar dia berkata begitu kami orang tua tidak bisa memaksakan kalau kami paksakan takut nanti anak saya kenapa-napa”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 09:00 WIB)

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah anak ibu berteman dengan anak-anak yang tidak bersekolah juga dan Ibu Siti Zainap menjawab :

“Anak saya temannya banyak, tapi saya liat kadang pas main kerumah saya tanya masih sekolah atau tidak mereka menjawab tidak.” (Senin, 23 November 2020 Pukul 09:00 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Nur Baiti salah satu masyarakat Gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tentang alasan mengapa anak Ibu tidak melanjutkan pendidikannya atau putus di tengah jalan, sebagai berikut :

“Sempat masuk kelas 1 Mts tapi lama-lama dia tak mau sekolah lagi alasannya banyak tugas dan jauh dari sekolah dan sampai sekarang tak mau sekolah lagi. lagipun anak kami dah tamat SD itupun sudah cukup. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:10 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Fauzi salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang alasan mengapa anak Bapak tidak melanjutkan pendidikannya atau putus di tengah jalan, sebagai berikut :

“Saya sebagai orang tua apalagi ayahnya pasti mau anaknya saya sekolah tapi inilah yang susah di hilangkan anak saya tak mau sekolah, anak saya berhenti sekolah kelas 4 SD, Saya bujukpun tak mau, sempat mamaknya antar kesekolah tiap hari dia pun tak mau, mamaknya ada bilang sama gurunya suruh gurunya bilang ke anak saya untuk sekolah. Liatlah sampai saat ini tak mau sekolah lagi”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Yusrita salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang alasan mengapa anak Bapak tidak melanjutkan pendidikannya atau putus di tengah jalan, sebagai berikut :

“Anak saya tak mau sekolah lagi karna dia tak mau sekolah, saya suruhlah dia sekolah tapi dia tidak mau, kami juga dari keluarga tidak bisa memaksa. ”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat orang tua anak putus sekolah bisa disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan dari segi solusi sudah diberikan hanya saja masih perlu dilakukan tindakan lanjutan dalam mengatasi anak putus sekolah karna memang kenyataan dilapangan yang menjadi penyebabnya itu dari faktor internal dan faktor eksternal.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif yang akan dipilih oleh organisasi. Hasil yang dipilih berdasarkan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan.

Pada indikator perumusan strategi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator perumusan strategi, sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana membuat program terkait penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Kalo untuk program secara terinci memang tak terbunyikan dalam program Dinas Pendidikan cuman dalam mengupaya untuk mengantisifasi anak putus sekolah seperti yang sudah dijelaskan pada wawancara sebelumnya”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Mengenai langkah-langkah dalam mengatasi anak putus sekolah, pemerintah punya program namanya Program Indosenia Pintar (PIP). PIP ini diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dia punya Kartu Indonesia Pintar, dan sekolah memiliki kewajiban untuk memasukkan data anak yang mendapat PIP ini untuk mendapatkan KIP. Kita dinas Pendidikan tidak mengurus kartunya tetapi pemanfaatannya bagi yang sudah masuk data dan untuk anak yang tidak punya KIP di PIP itu juga memungkinkan untuk diusulkan cuman untuk kartu yang non KIP itu ada skala prioritas tetap kita minta untuk sekolah mengajukan sebab inilah salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang dalam tanda petik terancam untuk putus sekolah”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pembuatan program dan langkah-langkah mengatasi anak putus sekolah yakni dengan mengedepankan Program Indonesia Pintar (PIP).

Selanjutnya wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan tentang bagaimana membuat program terkait penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Terkait program ini kami hanya mengikuti program dari atasan kami camat gaung hanya bisa mengawasi terlaksana tidak program tersebut dan juga kami hanya mendata anak putus sekolah”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Lanjutan wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan tentang bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Langkah dari Bapak, Bapak akan memanggil orang tua yang bersangkutan atau langsung kerumah, caranya dengan turun langsung kelapangan bersama kasi kesus akan langsung kerumahnya”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Berdasarkan wawancara bersama Camat Gaung bisa peneliti lihat bahwa memang untuk di Kecamatan sendiri belum ada program kecamatan hanya mengikut dari atasan, sedangkan langkah-langkahnya yakni dengan berhubungan langsung dengan yang bersangkutan.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Siti Zainap salah satu masyarakat orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah , sebagai berikut :

“Sangat bagus, sekurang-kurangnya bisa mengurangi beban biaya kami yang kurang, karna selama ini semua program atau bantuanpun tak merata, kadang-kadang kita orang biasa jarang dapat informasi seperti itu.”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 09:00 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Nur Baiti salah satu masyarakat Gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah , sebagai berikut :

“Ya Alhamdulillah, begitu memang seharusnya sekolah harus diperhatikan oleh pemerintah, tambah lagi kami ini jauh dari sekolah kalau bisa dibangun satu sekolahan dekat rumah saya supaya anak saya mau bersekolah jangan sampai ada lagi anak yang tak bisa bersekolah”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:10 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Fauzi salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah tentang bagaimana tanggapan Bapak mengenai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah , sebagai berikut :

“Bagus itu untuk anak-anak yang putus sekolah, memang itu yang di harapkan kami ada perhatin dari pemerintah entah itu sekolah gratis atau apa tetap kami dukung”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Yusrita salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah , sebagai berikut :

“Tanggapan saya bagus soalnya selama ini ada bantuan orang yang mampu dapat sedangkan kami orang tak mampu tak dapat sebab itulah anak kami tak sekolah”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat orang tua anak putus sekolah bisa dilihat bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya program tersebut.

Namun yang menjadi kendala saat ini adalah dari anak itu sendiri dan dorongan orang tuanya.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan. Hasil yang dipilih berdasarkan hasil dari Implementasi strategi yang telah dilakukan.

Pada indikator Implementasi strategi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Implementasi strategi, sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana membuat kebijakan melalui pengembangan program terkait penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Dalam kebijakannya pemerintah sendiri telah membuat program wajib belajar 9 tahun dengan berbagai bantuan dana seperti Program Bantuan Beasiswa Miskin (BSM), Program Program Indonesia Pintar (PIP), Sosialisasi kepada masyarakat”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana prosedur penganggaran dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Khusus anggaran untuk anak putus sekolah belum ada dari kita Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Tetapi untuk anggaran pendidikan ada dan tidak memilikinya perwilayah, jadi tetap anggaran di Dinas Pendidikan cuman pemanfaatannya itu tergantung dari program kegiatannya”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bisa dilihat bahwa untuk kebijakan program itu wajib belajar 9 tahun dan untuk anggaran khususnya penanganan anak putus sekolah belum ada. Dan hanya menyediakan berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Selanjutnya wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan tentang bagaimana membuat kebijakan melalui pengembangan program terkait penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Yang membuat kebijakan itu dari pemerintah daerah kita kecamatan hanya melaksanakan, seperti kebijakan program wajib belajar 9 tahun ya kita hanya bisa melaksanakan dengan mensosialisasikan kepada sekolah dan masyarakat terkait arti penting pendidikan”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Lanjutan wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan tentang bagaimana prosedur penganggaran dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Untuk prosedur penganggaran kita tidak punya kewenangan mengatur anggaran kita hanya menjalankan dan anggaran pun datang sesuai kebutuhan perwilayah”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Berdasarkan wawancara bersama Camat Gaung bisa dilihat bahwa kebijakan pembuatan program dan prosedur penggaran dana untuk anak putus sekolah merupakan bukan kewenangan dari camat melainkan dari pemerintah daerah.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Siti Zainap salah satu masyarakat orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama tentang tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan program wajib belajar, sebagai berikut :

“Programnya wajib 9 tahun kan, berarti dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama, bagus-bagus aja tapi apakah mengerti kami ini kalau tidak di beritahu atau disosialisasikan”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 09:00 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Nur Baiti salah satu masyarakat Gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tentang tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan program wajib belajar, sebagai berikut ?

“Seharusnya program ini harus terlaksanakan, jujur kami tak tau kalau ada program wajib belajar 9 tahun kalau kami tahu kan bisa kami suruh anak kami untuk melanjutkan sekolah setidaknya lulus SMP”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:10 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Fauzi salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan program wajib belajar 9 tahun, sebagai berikut ?

“Jujur nak kami tidak tau mengenai program wajib belajar yang kami tahu hanya bantuan miskin dan bos. kalaupun program ini bisa menjamain untuk anak kami bisa sekolah mau kami paksa anak kami sekolah, setidaknya tamat SMP, ini tidak sd pun sudah tak mau sekolah lagi”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Yusrita salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan program wajib belajar, sebagai berikut :

“Baguslah soalnya anak sekarang ni susah untuk belajar, kalo bisa program wajib belajar ini di sosialisasikan kepada masyarat supaya masyarakat tau, karna kami ini orang awam jadi kurang paham tentang program-program”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat orang tua anak putus sekolah terkait Program Wajib Belajar Yang Tertera Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, memang perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tau tentang pendidikan dan bantuan-bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah agar terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan Pengendalian merupakan proses perbandingan atau membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk dievaluaso hasil-hasil yang telah diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan. Hasil yang dipilih berdasarkan hasil dari Evaluasi dan Pengendalian yang telah dilakukan.

Pada indikator Evaluasi dan Pengendalian ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan tentang Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Evaluasi dan Pengendalian, sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan bagaimana tentang adanya program beasiswa terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Untuk program beasiswa pemerintah menyediakan Program Indosnesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sedangkan untuk alternatif lain yang bisa kami berikan yaitu dengan berkoordinas dan bekerja sama dengan berbagai sektor seperti kepala sekolah, majelis guru dan masyarakat. Karna memang untuk PIP ini cukup banyak yang sasarannya kurang tepat karna sebagaian digunakan oleh orang tuanya untuk kepentingan konsumtif rumah tangga. Jadi itulah problemnya walaupun sudah dibantu oleh pemerintah”. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak H. Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd selaku Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beliau mengatakan tentang bagaimana sarana dan prasarana sekolah terkait dengan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Untuk sarana dan prasarana sendiri khusus untuk anak putus sekolah tidak ada. Tapi untuk pendidikan secara umum kita ada dan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan tergantung prioritas sesuai kondisi di lapangan dan sesuai dengan kondisi anggaran daerah. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Lanjut peneliti menanyakan kembali bagaimana dengan sarana dan prasarana seperti jalan dan infrastruktur sekolah di Kecamatan dan beliau menjawab :

“Untuk sarana dan prasarana setiap kecamatan itu berbeda contoh tembilahan dengan kecamatan gaung tidak bisa kita samakan karna tembilahan merupakan ibu kota tentunya kebutuhannya berbeda dengan kecamatan“. (Rabu, 18 November 2020 Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai program beasiswa cukup baik hanya saja perlu di evaluasi kembali karna masih ada tidak tetap sasaran, selanjutnya sarana prasarana jika dilihat dilapangan khususnya kecamatan gaung masih kurang karna jarak tempuh yang jauh dari sekolah.

Selanjutnya wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan bagaimana tentang adanya program beasiswa terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Program beasiswa dan bantuan itu memang sudah ada dari pemerintah dan kami juga meminta dari pihak sekolah mendata anak yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut, tapi khusus untuk anak putus sekolah memang belum ada yang ada itu hanya bantuan alternatif sekolah paket dan smp marginal”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Lanjutan wawancara bersama bapak Said Zulfahmi, SE selaku Plt Camat Gaung beliau mengatakan tentang bagaimana sarana dan prasarana sekolah terkait dengan anak putus sekolah di Kecamatan Gaung, sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana sekolah bapak rasa cukup baik, untuk jalan memang harus dipertahikan kembali karna gaung ini terletak di perairan rata-rata stransportasi laut adapun jalan darat itu banyak yang rusak dan jarak sekolah sama rumah pun jauh”. (Jum’at, 20 November 2020 Pukul 09:40)

Berdasarkan wawancara bersama Camat Gaung bisa peneliti lihat bahwa memang untuk di Kecamatan sendiri belum ada program beasiswa harus ditinjau kembali kemudian sarana dan prasarana juga harus diperhatikan lagi terutama jalan.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Siti Zainap salah satu masyarakat orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama tentang bagaimana tanggapan ibu mengenai sarana dan prasarana dan infrastruktur sekolah, sebagai berikut :

“Kalau untuk infrastruktur sekolah disini masih banyak sekolah dari papan terus kurang kelas kadang saya liat ada yang masuknya gantian”.
(Senin, 23 November 2020 Pukul 09:00 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibu Nur Baiti salah satu masyarakat Gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tentang bagaimana tanggapan ibu mengenai sarana dan prasarana dan infrastruktur sekolah, sebagai berikut :

“Sarana sekolah sini bagus tapi tak banyak anak sekolah disini, rata-rata sekolah luar semua paling yang sekolah sini yang dekat-dekat sama yang tak mampu”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:10 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Fauzi salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang bagaimana tanggapan Bapak mengenai sarana dan prasarana dan infrastruktur sekolah, sebagai berikut :

“Saya liat sekolah Sd sini sudah bagus tapi ada juga kursi dan meja masih dari kayu berbeda dengan di tembilahan, tapi itulah anak saya ini yang tak mau sekolah”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Yusrita salah satu masyarakat gaung orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang bagaimana tanggapan ibu mengenai sarana dan prasarana dan infrastruktur sekolah, sebagai berikut :

“Tempat anak saya sekolah dulu itu bagus sih, tapi masih ada kurang seperti buku-buku kalo disini cari buku itu susah maunya sekolah itu lengkap terus jam masuknya juga tak teratur namanya aja sekolah di parit”. (Senin, 23 November 2020 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat orang tua dari anak putus sekolah jika dilihat dari tanggapan tersebut memang untuk di Gaung rata-rata bangunan atau infrastruktur sekolah masih kurang dan jalan akses dari sekolah ketempat tinggal juga kurang baik mungkin disini pemerintah bisa liat dengan program jangka panjang yakni pembangunan dengan jangka 5 tahunan ini harus di evaluasi kembali.

C. Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi hambatan dalam Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

1. Hambatan dalam Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, rendahnya ekonomi keluarga hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah dengan alasan membantu orang tua bekerja.
2. Berdasarkan Indikator Pengamatan Lingkungan, dalam menjalankan sebuah Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ini yang menjadi hambatan baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat yakni pengaruh lingkungan sekitar. Hasil wawancara bersama Bapak Fathurrahman, S.Ag.,M.Pd beliau menyebutkan bahwa :

“Pengaruh lingkungan sekitar, contoh kecil saja teman bermain kita tidak banyak sedikit kita pasti terpengaruh seperti game online yang berawal dari teman bermain”.

Salah satu pemicu utamanya perilaku pada anak terletak pada lingkungan sekitar. Karna teman bermain itu bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif.

3. Berdasarkan Indikator Perumusan Strategi, dalam menjalankan sebuah Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi hambatan disini yaitu kebijakan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM) teruntuk masyarakat kurang mampu. Program ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya akan tetapi dalam pemanfaatannya kurang tetap sasaran karna untuk memenuhi kebutuhan lain.
4. Selanjutnya Indikator Implementasi Strategi, dalam menjalankan sebuah Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi hambatan disini yaitu kebijakannya pemerintah mengeluarkan program wajib belajar akan tetapi Kebijakan akan adanya program tersebut tampaknya kurang di aplikasikan oleh masyarakat terutama masyarakat yang kurang memahami akan pendidikan.
5. Berikutnya Indikator Evaluasi dan Pengendalian, dalam menjalankan sebuah Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi hambatan disini yaitu program beasiswa yang diterima tidak digunakan sepenuhnya untuk keperluan sekolah melainkan keperluan di luar sekolah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat disimpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Indikator Pengamatan Lingkungan

Pada indikator pengamatan lingkungan dapat diketahui bahwa dinas pendidikan melakukan tugasnya dalam mengatasi anak putus sekolah ini yakni memberikan solusi berupa himbauan dan berkoordinasi kepada Kepala sekolah dan Majelis Guru, bagi siswa yang kurang mampu bisa mengambil paket a dan paket b serta sekolah marginal bagi daerah sulit..

2. Indikator Perumusan Strategi

Pada indikator perumusan strategi, dinas pendidikan melalui program pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk mengantisipasi terjadinya anak putus sekolah.

3. Indikator Implementasi Strategi

Pada indikator implementasi strategi, dinas pendidikan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 34 tentang program wajib belajar melalui koordinasi dan himbaun kepada seluruh kepala sekolah dan majelis guru.

4. Indikator Evaluasi Dan Pengendalian

Pada indikator evaluasi dan pengendalian, pemerintah dinas pendidikan telah melakukan evaluasi setiap program agar program tersebut terealisasi dengan tepat baik itu dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta alternatif lain seperti penyediaan Paket A dan Paket B serta Sekolah Marginal bagi daerah sulit agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah.

Dengan demikian bahwa Strategi sangat berpengaruh terhadap program ataupun kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui sebuah tindakan dan proses mengatur serta memberikan langkah-langkah solusi melalui program pemerintah yang dijalankan oleh dinas pendidikan sebagai instansi atau organisasi di bidang pendidikan.

B. Saran

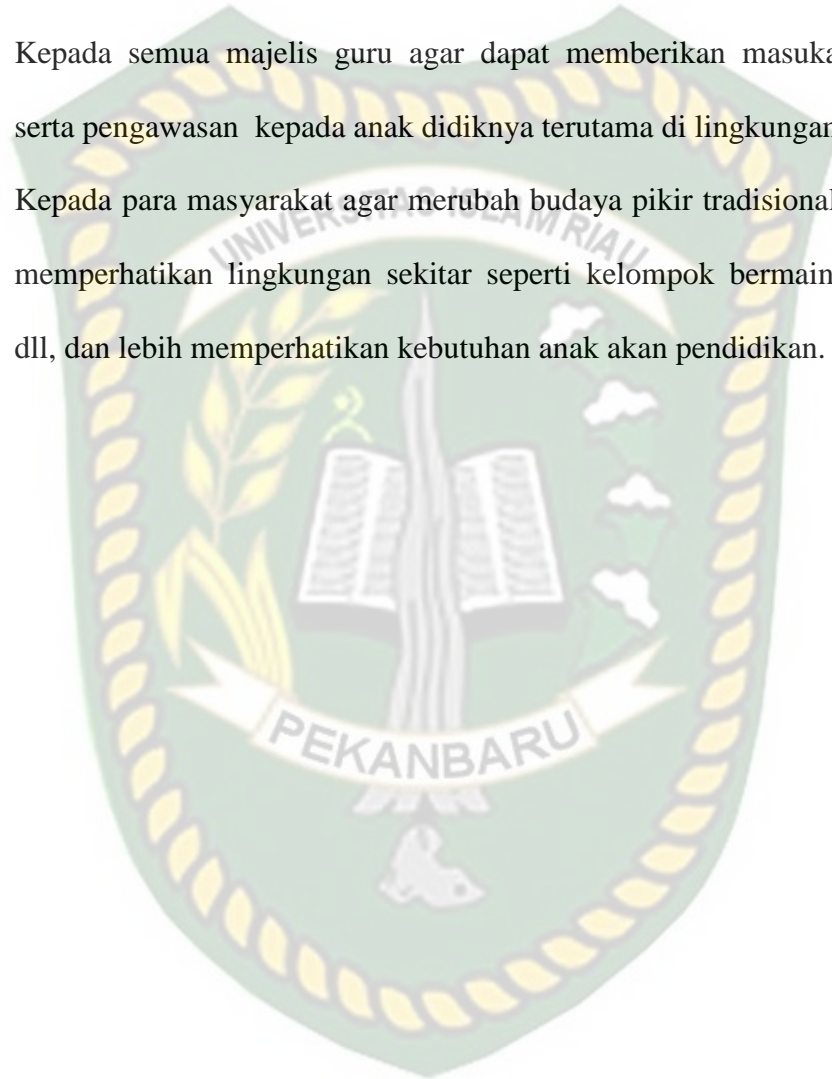
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di setiap Kecamatan dengan memberikan fasilitas yang kurang di setiap kecamatan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan akan pentingnya pendidikan.

2. Kepada Camat Gaung diharapkan lebih memperhatikan peserta didik serta lebih teliti dalam mendata anak putus sekolah dan menyediakan kegiatan berupa pencegahan anak rawan putus sekolah kepada masyarakat setempat.
3. Kepada semua majelis guru agar dapat memberikan masukan motivasi serta pengawasan kepada anak didiknya terutama di lingkungan sekolah.
4. Kepada para masyarakat agar merubah budaya pikir tradisional serta lebih memperhatikan lingkungan sekitar seperti kelompok bermain, pergaulan dll, dan lebih memperhatikan kebutuhan anak akan pendidikan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Creswell, J. W. 2017. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian Cita Sari, R. T. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Hasbullah. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Hajiji, A. 2019. *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.
- Hajiji, A. 2019. *Kecamatan Gaung Dalam Angka*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hilir.
- Indartono, S. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartoyo. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: ANDI
- Kholis, N. 2014. *Manajemen Strategi Pendidikan (Formulasi, Implementasi dan Pengawasan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Labolo, D. M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lukman Hakim, M. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Jambi: Timur Laut Aksara .
- Nazarudin. 2020. *Manajemen Strategi*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nain, U. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ndraha, T. 2005. *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ndraha, T. 2015. *Kibernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Nugraha, Q. 2014. *Manajemen Strategis Pemerintahan* . Jakarta: Universitas Terbuka.

- Rahmat Hidayat, A. 2019. *Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*. Medan: LPPPI.
- Priyono. 2014. *Pengantar Manajemen*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Sunarto, K. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Wheelen, J. D. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Yusuf, M. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Zulkifli, d. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Jurnal

- Ahmad Fauzi R, A. G. 2012. Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo.
- Aryawan, I. W. 2019. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Pada Konsep Panca Upaya Sandhi.
- Elsa Triani, R. S. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Fitriani, F. 2018. Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015.
- Kusbowo, R. 2016. Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cinaku Tahun 2011-2012).

- Lukman, I. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
- Morin Benjamin, A. P. N.D. 2017. Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung.
- Saputra, R. 2017. Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015.
- Firdaus, M. R. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat Smp/Mts Di Kota Malang).
- Fitriani, F. 2018. Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015.
- Islam, M. R. 2020. Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Usia Anak Sekolah Menengah Atas (Studi Di Kabupaten Lampung Timur).
- Kumara, D. 2018. Startegi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerahkota Tangerang Selatan.
- Karniawati, N. 2015. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat).
- Ni Ayu Krisna Dewi, A. Z. 2014. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013.
- Murtia, P. H. 2019. Anak Putus Sekolah Studi Kasus Di Desa Lembelu Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna.
- Purnamasari, M. 2017. Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Pencapaian Riau Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Di Asia Tenggara Tahun 2020.
- Rahmad.M, M. M. 2016. Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah.
- Rembulan, A. 2019. Studi Analisis Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

- Rizqa, N. 2015. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Smp Di Desa Bumi Reja Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2014.
- Sandhopa, L. 2019. Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Satrio, A. B. N.D.2016. Strategi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Blitar.
- Thalib, M. D. 2013. Problematika Putus Sekolah Dan Pengangguran (Analisis Sosial Pendidikan).
- Triani, E., Rahman, & Saidin. (N.D.). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengangg.
- Trivan King Robinson, B. K. 2019. Strategi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pengembangan Parawisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Wassahua, S. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon.
- Widanarto, A. 2016. Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan Di Kota Bandung.
- Wijaya, H. 2018. Peranan Teori Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Indonesia.
- Wurangian, M. 2015. Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- Zainal, I. 2019. Intelijen Pemerintahan Sebagai Cabang Baru Dari Ilmu Pemerintahan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 796 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Sulistriani
NPM : 177310150
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
Persentase Plagiasi : 30 %
Jumlah Halaman : **113 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230